



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2018/Periodik - 2017)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
**UNIT KERJA** : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
**SUB UNIT KERJA** : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ATIH WITARTIH
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 85602

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/56 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 13.000 m2/3.600 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 231.000.000

1. MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 1985, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOBIL, HONDA RS/MT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 213.000.000
3. MOTOR, HONDA NF100SE Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
4. MOTOR, HONDA D1B02N26L2 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 84.859.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 93.957.922**F. HARTA LAINNYA** Rp. 68.000.000**Sub Total** Rp. 1.477.816.922**III. HUTANG** Rp. 144.654.019**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.333.162.903

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id).



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **16 Januari 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.